

Rencana Aksi Pengelolaan Merkuri Tak Menyeluruh

Rencana aksi nasional pengelolaan merkuri di Indonesia dinilai belum menyeluruh. Beberapa aspek utama, seperti penanganan kesehatan dan remediasi area tercemar logam berat merkuri, tidak tersentuh.

"Pembuatan rencana aksi tak pernah mengajak konsultasi masyarakat sipil ataupun pengusaha," kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor BaliFokus Indonesia, Senin (3/2), dihubungi di Lebak, Banten. BaliFokus merupakan lembaga nonpemerintah yang fokus pada manajemen lingkungan berkelanjutan, termasuk bahan kimia dan beracun.

Sejak Oktober 2013, Indonesia bersama 93 negara lain menandatangani Konvensi Minamata di Jepang yang mengatur pengelolaan merkuri secara intern, bilateral, ataupun multilateral. Tujuannya, meminimalkan penggunaan dan paparan merkuri karena dinilai berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Menurut Yuyun, sebelum penandatanganan ini, Indonesia sudah menyusun rencana aksi. Namun, proses ratifikasi masih menunggu respons DPR. Negara pertama peratifikasi konvensi itu Amerika Serikat.

Rencana aksi di Indonesia terbagi dalam sektor pertambangan kecil dan pembangkit listrik tenaga uap (emisi hasil pembakaran batubara) yang dikoordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta produk barang-barang yang menggunakan bahan merkuri (Kementerian Perindustrian).

Yuyun mengatakan, belum melihat rencana aksi Indonesia dalam menangani limbah merkuri. "Sisi kesehatan juga tidak tampak. Padahal, konvensi itu tak hanya soal lingkungan, tetapi kesehatan," ujarnya.

Remediasi juga dinilai tak tampak dalam dokumen. Padahal, dengan lebih dari 800 titik penambangan liar di Indonesia, pencemaran lingkungan sudah meluas. Merkuri sebagai pemisah logam emas dengan kotorannya.

Merkuri ilegal

Meski masih dipakai luas di penambangan emas, Yuyun mengatakan, impor merkuri di Indonesia relatif kecil, yaitu 559 kilogram (Kementerian Perdagangan, 2012). Ini bertolak belakang dengan catatan PBB yang mencatat impor merkuri Indonesia mencapai 290 ton.

Secara terpisah, Margaretha Quina, peneliti dari Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), mengatakan, merkuri ini banyak digunakan penambangan emas skala kecil. "Sikap pemerintah belum tampak 100 persen dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan lokasi tercemar limbah merkuri," katanya.

"Melalui rencana ini akan bisa kita lihat strategi pemerintah dalam menangani persoalan merkuri, termasuk bagaimana pemerintah mendudukkan soal persebaran merkuri ilegal dan upaya untuk menangkap aktor di belakang persebaran merkuri ilegal di Indonesia," katanya.